

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Anak dalam Mewujudkan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kotalama

Kemala Hasanah

Universitas Modern Al Rifa'ie Indonesia. Alamat Jl. Raya Ketawang No.99, Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174
Email : kemalahasanah3@gmail.com

Kilas Artikel

Volume 6 Nomor 1
Februari 2026
DOI:<https://doi.org/10.58466/literasi>

Article History

Submission: 16-11-2026

Revised: 16-01-2026

Accepted: 19-01-2026

Published: 02-01-2026

Kata Kunci:

Penguatan, Kelembagaan, Pemberdayaan Anak, Layak Anak

Keywords:

Strengthening, Institutions, Child Empowerment, Child-Friendly.

Korespondensi:

(Kemala Hasanah

(kemalahasanah3@gmail.com)

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kelembagaan dan pemberdayaan anak dalam upaya mewujudkan Kelurahan Layak Anak (KLA) di Kelurahan Kotalama, Kota Malang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu sosialisasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak serta pendampingan pembentukan Forum Anak dan Gugus Tugas KLA tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas 25 perwakilan RW dan 25 anak usia 12-18 tahun. Peserta berperan aktif dalam diskusi dan musyawarah untuk membentuk serta memilih pengurus kelembagaan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip KLA, terutama partisipasi anak dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Terbentuknya Forum Anak dan Gugus Tugas KLA menjadi capaian konkret sekaligus wujud komitmen bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan anak dalam membangun lingkungan yang aman, inklusif, serta mendukung tumbuh kembang anak di Kelurahan Kotalama.

Abstract

This community service activity aims to strengthen institutional capacity and child empowerment in realizing a Kelurahan Layak Anak (KLA) in Kotalama, Malang City. The implementation consisted of two main stages: socialization of Malang City Regional Regulation Number 3 of 2024 concerning Child-Friendly Cities, and assistance in establishing the Children's Forum and the KLA Task Force at the village level. A participatory approach was employed, involving 50 participants comprising 25 neighborhood representatives and 25 children aged 12-18 years. Participants actively engaged in discussions and deliberations to form and elect the management of child institutions. The results indicate an increased understanding among participants regarding KLA principles, particularly child participation and community roles in creating a child-friendly environment. The establishment of the Children's Forum and the KLA Task Force serves as a concrete achievement and a shared commitment among the village government, community, and children to build a safe, inclusive environment that supports children's growth and development in Kotalama.



Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul di masa depan. Salah satu strategi yang dikembangkan pemerintah adalah penerapan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. KLA menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan partisipatif bagi anak. Kota Malang sebagai salah satu daerah yang berkomitmen terhadap program ini telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak sebagai landasan hukum implementasinya di tingkat kelurahan. Kelurahan Kotalama menjadi salah satu wilayah yang mulai memperkuat kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam mendukung program tersebut.

Menurut Kementerian PPPA (2023), forum anak berfungsi sebagai wadah bagi anak untuk menyalurkan aspirasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Selain itu, keberadaan Gugus Tugas KLA di tingkat kelurahan menjadi elemen strategis dalam memastikan keberlanjutan program serta koordinasi lintas sektor di masyarakat. Pemberdayaan berbasis kelembagaan seperti ini selaras dengan pendekatan community development yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan pembangunan sosial.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa di Kelurahan Kotalama sudah terbentuk forum anak maupun gugus tugas kelurahan layak anak, namun telah habis masa bakti kepengurusan. Dimana terakhir di tahun 2024. Selain itu, sebagian besar masyarakat dan perwakilan RW masih memiliki pemahaman terbatas terhadap prinsip dan mekanisme penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian yang tidak hanya memberikan sosialisasi tentang kebijakan KLA, tetapi juga mendampingi proses pembentukan kelembagaan yang melibatkan anak dan masyarakat secara langsung.

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana strategi penguatan kelembagaan dan pemberdayaan anak dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kotalama? Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan anak tentang konsep serta regulasi KLA.
- 2) Memfasilitasi pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Anak Kelurahan Kotalama.
- 3) Mendampingi proses pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagai mitra kerja pemerintah kelurahan.
- 4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan ramah anak secara berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif dengan desain Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan anak sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, serta pelaksanaan kegiatan. Tujuannya agar kegiatan tidak hanya bersifat sosialisasi satu arah, tetapi mendorong munculnya rasa memiliki terhadap hasil yang dicapai. Dalam konteks Kelurahan Layak Anak (KLA), pendekatan ini relevan karena keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi warga dan keberlanjutan kelembagaan di tingkat lokal.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kelurahan Kotalama, Kota Malang, pada hari Sabtu, 4 Oktober 2025 pukul 09.00 WIB. Peserta berjumlah 50 orang, terdiri dari 25 perwakilan RW se-Kelurahan Kotalama dan 25 anak usia 12-18 tahun yang mewakili lingkungan masing-masing. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk



memastikan representasi antara unsur masyarakat dewasa dan anak. Komposisi ini mendukung prinsip inklusivitas dan keberagaman yang menjadi dasar KLA.

Bahasa yang digunakan selama kegiatan adalah Bahasa Indonesia yang komunikatif dan edukatif, dengan penyederhanaan istilah teknis agar mudah dipahami oleh seluruh peserta, termasuk anak-anak. Narasumber juga memanfaatkan pendekatan komunikasi dua arah berupa tanya jawab, diskusi kelompok, dan simulasi sederhana. Media bantu yang digunakan meliputi presentasi PowerPoint, serta alat tulis dan papan diskusi (flipchart) untuk memfasilitasi partisipasi aktif peserta.

Metode pelaksanaan terdiri atas lima tahapan utama sebagai berikut:

- 1) Tahap Persiapan
Meliputi koordinasi dengan perangkat Kelurahan Kotalama, penyusunan jadwal, pengumpulan data awal tentang kondisi kelembagaan anak, serta penyusunan materi sosialisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak.
- 2) Tahap Sosialisasi Kebijakan
Narasumber menyampaikan materi tentang konsep, tujuan, dan indikator KLA, termasuk hak anak, peran keluarga, masyarakat, dan lembaga. Materi disusun dalam bentuk paparan visual dan disampaikan secara interaktif.
- 3) Tahap Diskusi dan Identifikasi Masalah
Peserta dibagi menjadi dua kelompok besar – kelompok anak dan kelompok masyarakat – untuk mendiskusikan peran masing-masing dalam mendukung lingkungan layak anak. Setiap kelompok mengidentifikasi kendala dan peluang di wilayahnya.
- 4) Tahap Pembentukan Kelembagaan
Melalui musyawarah, peserta mendirikan dua kelembagaan: Forum Anak Kelurahan Kotalama dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak. Proses pemilihan ketua dan pengurus dilakukan secara demokratis dengan prinsip musyawarah mufakat.
- 5) Tahap Evaluasi dan Refleksi
Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi melalui kuisioner singkat dan diskusi terbuka. Evaluasi mencakup peningkatan pengetahuan peserta tentang KLA, pemahaman peran kelembagaan, serta komitmen tindak lanjut

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 di Balai Kelurahan Kotalama, Kota Malang, berlangsung dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari seluruh peserta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, narasumber dari Universitas Modern Al Rifa'iye Indonesia, yaitu Kemala Hasanah, S.E., M.M., berperan sebagai fasilitator utama dalam proses sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan pembentukan kelembagaan anak di tingkat kelurahan.

Secara umum, kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta, yang terdiri dari unsur pemerintah kelurahan, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan kepemudaan, serta perwakilan anak-anak usia 12-18 tahun. Berdasarkan daftar hadir resmi, peserta terdiri atas unsur perangkat kelurahan (lurah, kepala seksi, bhabinkamtibmas, dan babinsa), lembaga kemasyarakatan (LPMK, PKK, Karang Taruna, Posyandu, PAUD, dan Pokja Sehat), serta calon pengurus Forum Anak dan Gugus Tugas KLA. Kehadiran yang beragam ini menunjukkan keterpaduan antara struktur pemerintahan lokal, masyarakat sipil, dan



kelompok anak dalam satu forum bersama, yang merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan KLA – yaitu sinergi lintas sektor dan lintas usia.

Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga siang hari. Kegiatan dibuka oleh Plt. Lurah Kotalama, Mohammad Rizal Al Farouqy, S.E., yang menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah awal dalam upaya menjadikan Kotalama sebagai salah satu kelurahan pelopor layak anak di Kota Malang. Setelah sesi pembukaan, narasumber memaparkan materi inti yang berisi pengenalan kebijakan KLA, landasan hukum, indikator penilaian, serta peran strategis kelurahan dalam mendukung pencapaian indikator tersebut. Materi sosialisasi disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan disertai ilustrasi visual dari Materi Sosialisasi KLA yang telah disusun sebelumnya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta menunjukkan tingkat antusiasme yang tinggi. Perwakilan RW dan tokoh masyarakat banyak mengajukan pertanyaan mengenai bentuk konkret implementasi KLA di tingkat kelurahan, termasuk bagaimana mekanisme pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, serta bagaimana peran lembaga masyarakat dalam mendukung kegiatan ramah anak. Sementara itu, peserta dari kalangan anak menunjukkan keberanian dalam menyampaikan pendapat mereka tentang pentingnya ruang aman dan wadah partisipasi anak di lingkungannya. Respon positif dan interaktif ini mencerminkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan telah berhasil membangun suasana belajar yang inklusif.

Hasil utama kegiatan ini adalah terbentuknya dua kelembagaan baru, yaitu Forum Anak Kelurahan Kotalama dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak. Pembentukan kedua lembaga tersebut dilakukan melalui proses musyawarah yang difasilitasi langsung oleh narasumber. Sebelum proses pemilihan dilakukan, peserta anak dan perwakilan RW dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok anak berdiskusi mengenai peran dan fungsi Forum Anak, sementara kelompok orang dewasa berdiskusi mengenai peran Gugus Tugas KLA. Hasil diskusi kemudian disampaikan di forum pleno, diikuti dengan proses pemilihan ketua dan pengurus. Forum Anak dibentuk dengan anggota 22 anak usia 12-18 tahun dari berbagai RW di wilayah Kotalama. Pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis dan menghasilkan struktur yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan partisipasi anak. Forum ini diharapkan menjadi wadah utama bagi anak-anak untuk menyalurkan aspirasi dan terlibat dalam kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan. Sementara itu, Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak dibentuk dengan anggota 11 perwakilan RW, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga seperti PKK, LPMK, serta Karang Taruna. Gugus tugas ini bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap program anak dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip KLA di tingkat komunitas.

Dari hasil observasi lapangan, suasana pembentukan kelembagaan berlangsung kondusif dan penuh semangat kebersamaan. Anak-anak yang terlibat menunjukkan rasa percaya diri dan antusias dalam mengajukan diri sebagai pengurus, sementara para orang dewasa memberi dukungan dan arahan positif. Fenomena ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip child participation dan intergenerational collaboration dalam konteks lokal. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kebijakan dan prinsip KLA. Berdasarkan kuesioner sederhana yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan, sekitar 40% peserta awalnya belum mengetahui isi dan tujuan Perda No. 3 Tahun 2024, dan hanya 45% yang memahami indikator dasar kelurahan layak anak. Setelah kegiatan, lebih dari 85% peserta menyatakan memahami substansi kebijakan KLA, termasuk hak anak, peran keluarga, dan mekanisme pembentukan kelembagaan. Selain itu, 90% peserta



anak menyatakan bahwa mereka merasa lebih berani menyampaikan pendapat setelah mengikuti kegiatan ini.

Temuan ini memperlihatkan bahwa sosialisasi yang disertai pendampingan partisipatif mampu meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun sense of belonging terhadap program. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep community empowerment yang dikemukakan oleh Ife (2016), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses pembangunan agar tercipta perubahan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dapat dikaitkan dengan teori penguatan kelembagaan sosial yang dikemukakan oleh Uphoff (1986), yang menyatakan bahwa lembaga lokal berperan sebagai wadah koordinasi dan penguatan nilai kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, pembentukan Forum Anak dan Gugus Tugas KLA bukan hanya kegiatan administratif, melainkan langkah strategis dalam membangun struktur sosial baru yang responsif terhadap kebutuhan anak. Penguatan dua kelembagaan ini juga menciptakan pola relasi baru antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan anak sebagai subjek pembangunan. Forum Anak berperan dalam aspek voice (suara anak), sementara Gugus Tugas berperan dalam aspek governance (tata kelola dan implementasi). Sinergi keduanya mencerminkan implementasi konsep collaborative governance di tingkat mikro, di mana keputusan diambil melalui dialog antara berbagai pihak. Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga co-creator dalam proses pembangunan kelurahan. Dampak sosial kegiatan ini mulai terlihat dari meningkatnya komitmen bersama untuk mengintegrasikan prinsip KLA ke dalam kegiatan kelurahan. Beberapa rencana tindak lanjut muncul secara spontan dari peserta, antara lain rencana mengadakan kegiatan rutin Forum Anak, pelatihan dasar kepemimpinan anak, serta kegiatan kolaboratif antara gugus tugas dan lembaga pendidikan di wilayah Kotalama. Pemerintah kelurahan juga menyatakan kesiapannya untuk memasukkan program ramah anak ke dalam agenda kerja tahunan LPMK.

Dari sisi akademik, kegiatan ini memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian berbasis riset dan kolaborasi multipihak. Selama kegiatan, dosen sebagai narasumber juga berperan melakukan observasi lapangan dan analisis partisipasi masyarakat. Hasilnya akan menjadi bahan pengayaan dalam perkuliahan dan penelitian lanjutan terkait model penguatan kelembagaan masyarakat berbasis anak. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya berdampak praktis bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu manajemen pembangunan sosial dan kebijakan publik lokal. Kegiatan ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif kelurahan sebagai unit terdepan. Pendekatan top-down dari pemerintah kota perlu dilengkapi dengan inisiatif bottom-up dari masyarakat dan anak-anak itu sendiri. Melalui kegiatan ini, Kelurahan Kotalama berhasil menunjukkan model praktik baik (best practice) bagaimana kolaborasi antara perangkat pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menghasilkan kelembagaan yang berkelanjutan.

Kendati demikian, hasil kegiatan juga menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan program, antara lain keterbatasan anggaran operasional, perlunya peningkatan kapasitas pengurus baru, dan pentingnya monitoring berkelanjutan agar forum anak tidak berhenti pada formalitas. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah kelurahan dan perguruan tinggi menjalin kemitraan jangka panjang dalam bentuk program pendampingan rutin serta pelatihan literasi anak dan kepemimpinan komunitas.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu memperkuat kelembagaan lokal dan memberdayakan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kelurahan. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan ini



menunjukkan bahwa anak-anak mampu menjadi agen perubahan ketika diberi ruang dan dukungan struktural yang memadai. Sinergi antara Forum Anak, Gugus Tugas, dan pemerintah kelurahan menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan sosial yang ramah anak dan berorientasi pada masa depan.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan menghasilkan tiga capaian utama. Pertama, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap konsep KLA serta peran masing-masing pihak dalam penerapannya. Peserta dari unsur masyarakat dan anak-anak menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami prinsip dasar KLA, seperti hak anak, partisipasi, serta pentingnya lingkungan sosial yang aman dan ramah anak.

Kedua, kegiatan ini berhasil membentuk dua kelembagaan baru yang menjadi instrumen strategis dalam pelaksanaan KLA, yaitu Forum Anak Kelurahan Kotalama dan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak. Forum Anak menjadi wadah representasi suara anak di tingkat kelurahan, sekaligus sarana pendidikan demokrasi bagi anak-anak untuk belajar berpendapat, mengambil keputusan, dan menyalurkan aspirasi. Sementara Gugus Tugas berfungsi sebagai lembaga koordinatif dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KLA. Kehadiran dua kelembagaan ini menjadi titik awal terbentuknya ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan kebijakan ramah anak.

Ketiga, kegiatan ini memperlihatkan bahwa sinergi antara perangkat kelurahan, masyarakat, dan anak-anak mampu menghasilkan perubahan sosial yang konkret. Pendekatan partisipatif memungkinkan terbentuknya komunikasi dua arah yang setara antara generasi dewasa dan generasi muda. Anak-anak memperoleh pengalaman langsung dalam mengorganisasi diri, sementara masyarakat belajar mendukung partisipasi anak tanpa mengurangi peran pengawasan dan perlindungan. Keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat juga memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi, yang menjadi karakter utama pembangunan berbasis komunitas.

Secara substansial, hasil kegiatan di Kelurahan Kotalama memberikan pembelajaran bahwa penyelenggaraan KLA bukan sekadar penerapan kebijakan formal, melainkan proses pembangunan sosial yang menuntut kesadaran kolektif dan kolaborasi berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan anak hanya dapat tercapai bila masyarakat dilibatkan secara aktif dan anak-anak diberikan ruang partisipasi yang bermakna. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa anak-anak memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan ketika mereka difasilitasi dengan pendekatan yang tepat dan lingkungan yang mendukung.



Dengan hasil yang telah dicapai, disarankan agar pemerintah kelurahan, lembaga masyarakat, dan perguruan tinggi terus menjaga komunikasi dan kolaborasi. Program pendampingan rutin, pelatihan kepemimpinan anak, serta forum dialog lintas generasi dapat menjadi strategi lanjutan untuk memperkuat semangat KLA di tingkat lokal. Diperlukan pula dokumentasi dan publikasi berkala tentang praktik baik ini agar dapat menjadi inspirasi bagi kelurahan lain di Kota Malang dan daerah lainnya di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, cita-cita mewujudkan Kota Layak Anak akan semakin dekat, dimulai dari satu kelurahan yang aktif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Pemerintahan Wilayah Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, yang telah memberikan kesempatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penghargaan juga saya tujuhan kepada Universitas Modern Al Rifa'iye Indonesia, yang telah memberikan dukungan penuh. Tidak lupa, apresiasi yang mendalam saya berikan kepada seluruh peserta kegiatan, tim pelaksana, serta masyarakat Kelurahan Kotalama atas partisipasi aktif, kerja sama, dan antusiasmenya bisa disampaikan kepada yang memberi hibah pengabdian masyarakat (jika kegiatan pengabdian masyarakat berasal dari dana hibah) atau Instansi, kelompok dan perorangan yang telah membantu terlaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat.

6.

DAFTAR PUSTAKA

- Arends, R. I., & Kilcher, A. (2010). *Teaching for student learning becoming an accomplished teacher*. New York, NY: Routledge.
- Huraerah, A. (2011). Kekerasan terhadap Anak: Fenomena dan Penanganannya di Indonesia. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ife, J. (2016). *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Panduan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Jakarta: KemenPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Petunjuk Teknis Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: KemenPPPA.
- Pemerintah Kota Malang. (2024). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Uphoff, N. (1986). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases*. West Hartford, CT: Kumarian Press.
- UNICEF Indonesia. (2020). *Child Friendly Cities Initiative in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia

